



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**AKTA PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Nomor xx-xx-xx/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/.../2019**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **dua ribu Sembilan belas** pukul ... WIB telah diajukan Keterangan Pihak Terkait, oleh:

..., Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, Pada Provinsi Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... 2019 memberi kuasa kepada ..., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

Dalam perkara antara:

..., Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, Pada Provinsi Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... 2019 memberi kuasa kepada ..., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diterbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor xx-xx-xx/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal ... dengan registrasi perkara **Nomor ...-...-.../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.**

Terhadap Keterangan Pihak Terkait tersebut, Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT) berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.